# BAB III

# OBYEK LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN

## 3.1 Gambaran Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta

Badan perencanaan pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta adalah badan yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah. Keberadaan Bappeda Kabupaten Purwakarta sejak tahun 1977 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta No. B/84/1977 tanggal 15 Juni 1977 tentang pembentukkan BAPPEDA Daerah Tingkat II Purwakarta, dipimpin oleh Bapak Soedaryadi, BA. sampai tanggal 15 April 1980. Pada kurun waktu tersebut tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Purwakarta belum semuanya dapat dilaksanakan karena banyak faktor seperti status hukum formal, susunan organisasi dan tata kerja yang dirasakan masih belum sempurna untuk Kabupaten Purwakarta.

Pada tanggal 9 September 1980 keluarlah Keppres Nomor 27 Tahun 1980 tentang pembekuan Bappeda Kabupaten Purwakarta yang kemudian disusul Keputusan Mendagri No. 185 Tahun 1980 tentang Pedoman di Daerah Tingkat I dan Tingkat II, dan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 050.1/68/1981 tentang Pembentukkan Tipe Bappeda Kabupaten Purwakarta. Pada saai itulah keberadaan Bappeda Kabupaten Purwakarta semakin membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih intensif sesuai dengan laju perkembangan pembangunan. Termasuk juga didalamnya yaitu perbaikan sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten



This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Purwakarta yang pada tahun 1980 masih sangat terbatas dengan fasilitas kantor di lingkungan Setwilda, kemudian di “Gedung Nasional” bersama Kantor Bankes dan percetakan.

Namun, dalam kurun waktu yang telah direncanakan, perkembangan sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Purwakarta semakin menunjukkan titik terang dengan menempati Kantor Pengadilan Lama bersama BP–7 dan Dinas Pariwisata. Pada saat itu, ternyata keberadaan Bappeda Kabupaten Purwakarta dengan segala yang terkait didalamnya telah mendapatkan prioritas yaitu menempati sarana gedung baru yang representatif di Jalan Gandanagara 9 Purwakarta.

### 3.2 Keadaan Geografis Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena berada pada jalur perlintasan antara Jakarta-Bandung-Cirebon. Kabupaten Purwakarta terletak di bagian tenggara belahan utara Propinsi Jawa Barat, antara 107° 30' - 107° 40' Bujur Barat dan 6° 25' - 6° 45' Lintang Selatan. Luas Kabupaten Purwakarta adalah 97.172 Ha atau 971,72 Km2. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah:

1) Sebelah timur :berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Subang
2) Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Karawang
3) Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Subang

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

4) Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Bandung

Posisi geografis ini menyebabkan Kabupaten Purwakarta memiliki potensial dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan/jasa serta pemukiman, di samping sektor-sektor lainnya. Hal ini, ditunjang pula adanya jalan tol Jakarta - Cikampek yang berujung di wilayah Purwakarta. dan jalan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) yang saat ini sudah selesai pembangunannya.

Berdasarkan kedudukannya itu, Purwakarta telah menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Untuk itu, di Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan kawasan industri seluas 2000 ha dan zona industri seluas 3000 ha serta kawasan pariwisata Jatiluhur. Dengan demikian, Kabupaten Purwakarta ke depan, mempunyai prospek yang sangat cerah dengan berbagai potensi daerah yang terus dikembangkan.

**3..3 Keadaan Demografis Kabupaten Purwakarta.**

Faktor pertumbuhan penduduk secara kuantitatif ditentukan oleh faktor-faktor kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Data yang diperoleh dari hasil sensus penduduk tahun 2006 Kabupaten Purwakarta berpenduduk 623.039 jiwa. Sedangkan hasil sensus penduduk tahun 2008 penduduk Kabupaten Purwakarta sebanyak 810.104 jiwa dan pada tahun 2009 jumlah penduduk mencapai 882.262 jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun laju pertumbuhan penduduk rata-rata per-tahun sebesar 2,42 %.

Migrasi yang cukup besar terjadi di daerah perkembangan wilayah Purwakarta, hal ini disebabkan oleh perkembangan pembangunan selama

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

kurun waktu tersebut terutama pada sektor industri. Berdasarkan kondisi topografinya, Kabupaten Purwakarta secara umum mempunyai kemiringan antara 2-15% sebesar 34,8% dari seluruh wilayah; kelas lereng antara 15-40% sekitar 33,13% dari luas seluruh wilayah.

Kabupaten Purwakarta terletak pada ketinggian lahan antara 40 meter dpl di bagian utara dan 2.064 meter dpl terdapat di bagian tenggara (Gunung Burangrang). Adapun Penduduk Kabupaten Purwakarta pada umumnya adalah Pemeluk Agama Islam yaitu sebanyak 99,13%, sedangkan selebihnya 0,18% memeluk Agama Katolik, 0,46% penduduk memeluk Agama Protestan, 0,11% penduduk memeluk Agama Hindu dan 0,12% penduduk memeluk Agama Budha.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**
**Jumlah Pemeluk Agama Di Kabupaten Purwakarta**

| No | Agama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Islam | 99,13% |
| 2. | Katolik | 0,18% |
| 3. | Protestan | 0,46% |
| 4. | Hindu | 0,11% |
| 5. | Budha | 0,12% |

Sumber : Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta Tahun 2010.

### 3.4 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan sumber dari Bagian Sub Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Purwakarta Tahun 2010. Pembangunan di Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk mewujudkan agar masyarakat

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Kabupaten Purwakarta merasa aman, nyaman dan tentaram. Adapun visi Kabupaten Purwakarta adalah :

Rumusan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2008-2013 didasarkan atas inspirasi dari analisis terhadap lingkungan dan isu strategis lokal Kabupaten Purwakarta. Gambaran Lingkungan Strategis dan Isu Strategis harus dapat disikapi secara proporsional berdasarkan potensi dan kemampuan daerah.

Atas pemikiran dan tekad yang kuat untuk mewujudkan *"Purwakarta Digjaya"* serta didorong dengan itikad *Ngawujudkeun Purwakarta Nagri Raharja,* berikut Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013, sebagai arah utama pembangunan jangka menengah daerah :

1. Mengembangkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa.
2. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global.
3. Meningkatkan keutuhan lingkungan baik *hulu* maupun *hilir,* fisik maupun sosial.

Mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif, yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, mengembangkan potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi kemakmuran rakyat.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Makna “Visi Pembangunan : Purwakarta Berkarakter” sesungguhnya secara sederhana merupakan pencerminan dari aspek kepribadian, ciri khas *(branded)*, kumpulan peran, mandiri, berdaya saing, tangguh, serta maju sesuai dengan tata nilai masyarakat Purwakarta yang berlandaskan *religi* keislaman dan tata nilai lokal pilemburan *(local values)*.

Makna Misi :

1. Mengembangkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

   Pendidikan :

   Untuk mewujudkan Visi Pembangunan : *“Purwakarta Berkarakter”* pada aspek kualitas sumber daya manusia dan tatanan kehidupan ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai misi untuk senantiasa mengembangkan pembangunan berbasis *religi* dan kearifan lokal, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa dimaksud tercermin, antara lain :

   a) Di Bidang Pendidikan, perlu dilakukannya penguatan nilai-nilai lokal (kearifan lokal, *local value*), baik yang bersifat geografis, teritorial maupun yang bersifat *capacity intelectual*. Hal ini sebagai bagian dari upaya optimalisasi potensi domestik, baik yang bersifat kultur, regional, lokal maupun menciptakan keunggulan personal,

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

yang memiliki kearifan intelektual, emosional dan spiritual, sehingga dapat membentuk generasi Purwakarta yang sesui dengan tata nilai : *cageur, bageur, bener, pinter, jeung singer.*

b) Di Bidang Kesehatan, perlu dibangunnya sarana pelayanan pengobatan masyarakat berupa Puskesmas yang memadai di seluruh Kecamatan, untuk mendekatkan fungsi pelayanan negara terhadap masyarakat. Pola hubungan yang dibangun adalah pola kemitraan yang terstruktur berdasarkan kualitas ekonomi rakyat untuk membangun dan mengintegrasikan hubungan timbal balik (*feed-back*) antara ekonomi atas, menengah dan bawah.

c) Di Bidang Pertanian, perlu diupayakan penguatan basis pertanian organisme, dengan mewujudkan integrasi potensi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan pariwisata yang disebut *gerakan balik ka lembur,* serta membangun kekuatan lumbung pedesaan melalui penguatan jaringan ketahanan pangan desa, sebagai bagian dari menjaga ketahanan pangan masyarakat secara makro. Dengan pengembangan upaya tersebut, diharapkan dapat terwujud swasembada pangan daerah serta sesuai dengan gambaran filosofi Sunda : *bru di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, rea ketan, rea keton, buncir leuit, loba duit, di hareup undeureun, di tukang alaeun, di pipir petikeun, di kolong aya si jambrong, na parango aya si jago.*

d) Di Bidang Investasi dan industri, perlu dibukanya area *zona* industri maupun kawasan industri yang dikuasai oleh pemerintah daerah

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

sebagai bagian dari kemudahan investor, dan simbiosis investasi antara negara dengan pelaku industri, dengan orientasi kemakmuran rakyat. Rancang bangun ini merupakan bagian dalam membangun hubungan perubahan sosialisme-kapitalisme atau dinamakan dengan istilah *bumi manjing ka langitna, ti langit seah hujana, lembur subur, kota bagja, masjid jeung diri ngahiji, harta geus ngawujud harti, hukum geus ngawujud adil, nyanding pamingpin ka rakyat, pandita ajeg wiwaha, ucap jeung langkah sarua, pitutur ngawangun subur, ayat ngawujud Adab.*

e) Di Bidang Ekonomi kerakyatan, optimalisasi potensi ekonomi kerakyatan perlu ditingkatkan yaitu melalui ketauladanan untuk mencintai berbagai produk rakyat, baik yang sudah tersentuh oleh pemerintah maupun yang belum tersentuh oleh pemerintah yang merupakan potensi keunggulan daerah.

f) Di Bidang Perdagangan dan Jasa, perlu dilakukannya upaya pengembangan, proteksi dan fasilitasi terhadap pedagang kecil dan pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pada bidang jasa pariwisata, perlu dilakukan upaya intesifikasi dan ekstensifikasi potensi pariwisata daerah, dengan lebih mengedepankan objek wisata alam dan wisata budaya sebagai wisata unggulan Purwakarta.

2. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan : *"Purwakarta Berkarakter"*, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai misi untuk senantiasa mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global dimaksud tercermin, antara lain dari upaya :

a) Mengembangkan jaringan jalan, arsitektur rumah, penataan perkantoran serta sarana dan prasarana lainnya yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan dan kompetisi global. Sehingga kita tidak kehilangan jatidiri dan orientasi masa depan sebagai masyarakat yang berbudaya.

b) Di bidang transportasi darat dan air, perlu dioptimalkannya berbagai sarana transportasi darat dan air yang mendekatkan hubungan antar daerah. Pola hubungan yang dibangun dalam konteks pembangunan sarana transportasi darat adalah pola simbiosis antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha mulai dari pembangunan sampai pemeliharaan, dengan prinsip *sareundeuk sa igel, sa bobot sa pihanean, ka cai jadi sa leuwi, ka darat jadi sa logak.*

3. Meningkatkan keutuhan lingkungan baik *hulu* maupun *hilir,* fisik maupun sosial.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan : *"Purwakarta Berkarakter"* pada aspek lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

mempunyai misi untuk senantiasa meningkatkan keutuhan lingkungan baik *hulu* maupun *hilir,* fisik maupun sosial. Pembangunan lingkungan dimaksud antara lain tercermin dari upaya :

a) Penegakan berbagai peraturan ataupun membuat peraturan baru, untuk melindungi berbagai areal yang menjadi kebutuhan publik secara luas. Seperti: perlindungan terhadap hutan, perlindungan terhadap sumber mata air, perlindungan terhadap areal persawahan, perlindungan terhadap keanggunan gunung, dan perlindungan terhadap daerah aliran sungai. Hal ini sebagai bagian dalam menjaga keutuhan lingkungan hidup serta kehidupan sosial lainnya yang merupakan upaya terciptanya simbiosis mutualisme antara manusia dan alam lingkungannya.

b) Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas airnya, menjaga kualitas lingkungannya, agar terjaga dari berbagai bentuk ambisi kepentingan ekonomi, yang pada akhirnya menghancurkan sistem nilai hayati dan nabati yang terkandung di dalamnya. Karena pada hakikatnya, sumber air, sungai dan danau yang ada di Purwakarta merupakan cermin watak peradaban masyarakat Purwakarta secara keseluruhan.

4. Mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif, yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, mengembangkan potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi kemakmuran rakyat.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan : *"Purwakarta Berkarakter"* pada aspek birokrasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai misi untuk senantiasa mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif, yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, mengembangkan potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi kemakmuran rakyat. Misi tersebut antara lain tercermin dari upaya :

a) Pengembangan tatanan birokrasi dan aparatur daerah, sehingga mampu terwujud lembaga birokrasi dan aparatur daerah yang mencerminkan tata nilai dan prinsip kesundaan : *landung kandungan, laer aisan, leuleus jeujeur liat tali, hade congcot, gede bacot, someah hade ka semah.*

b) Perwujudkan otonomi desa melalui penguatan otonomi kultural dan struktural masyarakat perdesaan, serta desentralisasi pembangunan desa dan desentralisasi pengelolaan anggaran perimbangan desa, yang mencerminkan semangat keadilan, atau *gemah ripah, repeh rapih, sugih mukti lemah cai, wibawa karta raharja*.

c) Membangun kekuatan hukum yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat dengan berorientasi pada produk hukum yang cerdas, tanggap terhadap perubahan dan berkembang sesuai dengan nalar, lingkungan alam dan masyarakat.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

## 3.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta.

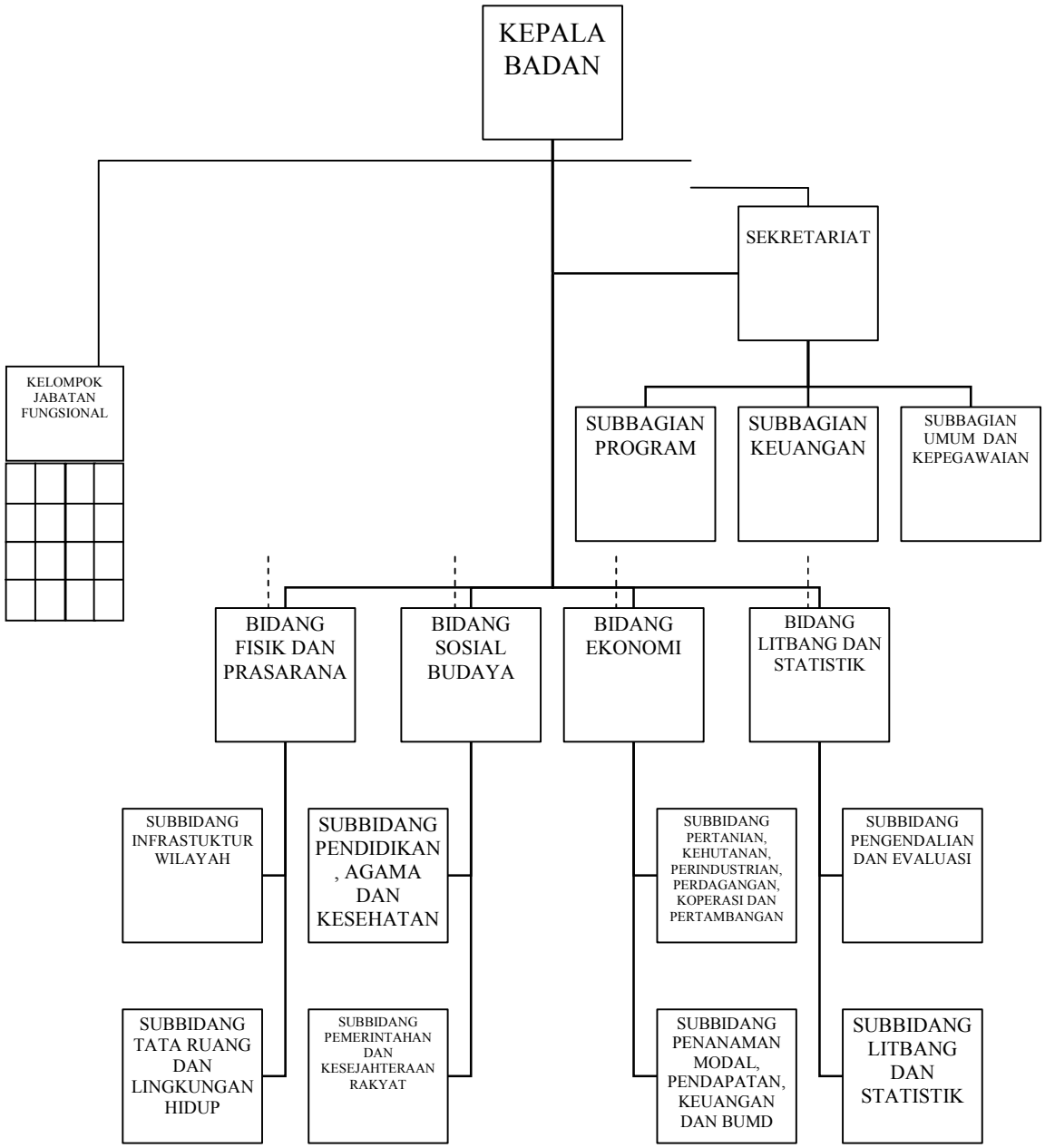
### 3.5.1 Struktur Organisasi

Perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah dan melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Pihak pemerintah daerah sudah selayaknya kini melepas paradigma ekonomi pembangunan lama (neoklasik) *laissez-faire* yang memegang pandangan pasar yang murni atau liberal secara ekonomi: bahwa pasar bebas sebaiknya dibiarkan pada seperti apa adanya, dan akan didispensasikan dengan inefisiensi dalam cara yang lebih bebas dan cepat seperti pemberian harga, produksi, konsumsi, dan distribusi dari barang dan jasa dibuat untuk ekonomi yang lebih baik atau efisien.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

**Bagan 3.2**
**Struktur Organisasi BAPPEDA**




Sumber : Bagian Sub Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Purwakarta Tahun 2010.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

### 3.5.2 Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan sumber dari Bagian Sub Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 yang menjadi Tugas Pokok dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan di daerah.
d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

(4) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1). Subbagian Program

2). Subbagian Keuangan

c. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :

1). Subbidang Infrastruktur Wilayah

2). Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :

1). Subbidang Pendidikan, Agama dan Kesehatan

2). Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

e. Bidang Ekonomi, terdiri dari :

1). Subbidang Pertanian, Kehutanan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan.

2). Subbidang Penanaman Modal, Pendapatan, Keuangan dan BUMD.

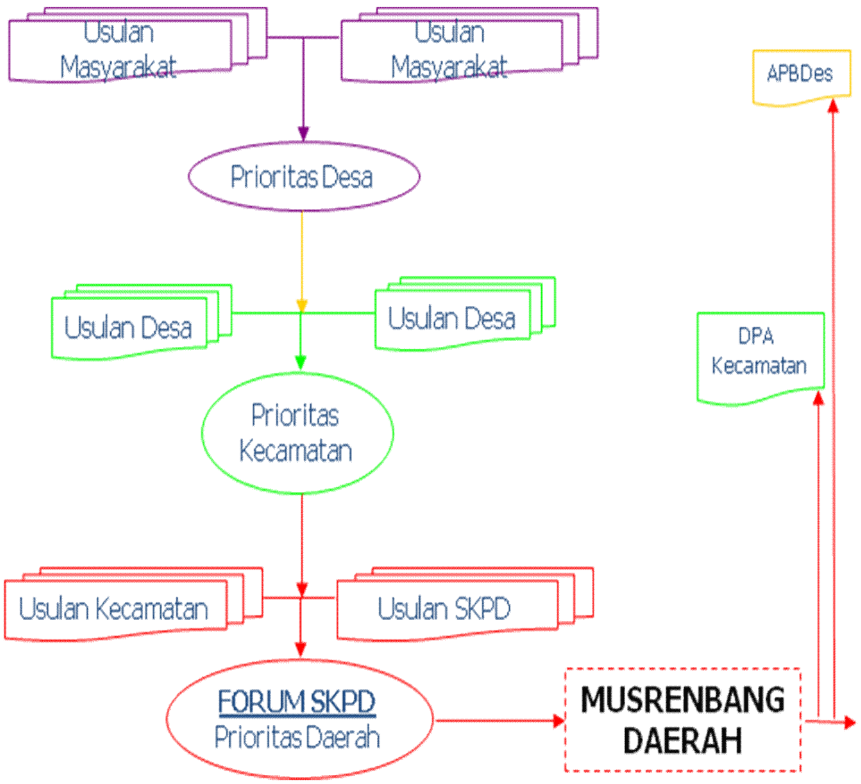
f. Bidang Litbang dan Statistik, terdiri dari :

1). Subbidang Pengendalian dan Evaluasi

2). Subbidang Litbang dan Statistik

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

**Tabel 3.3**
**Alur Pelaksanaan Musrenbang**
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**
**Kabupaten Purwakarta.**




Sumber : Bagian Sub Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Purwakarta Tahun 2010.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com